

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Mia Fajriati¹, Zulfatunnisa², Dinar Rifatul Wafa³, Rika Amanda Heryaningrum⁴,
Saiful Anwar⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

*Korespondensi: saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id

Recieved: 18/06/2021 | Revised: 30/11/2021 | Accepted: 05/12/2021

Abstract

Regional spending aims to prosper the community and advance the region, when regional income increases, the region will be more capable and independent to finance regional expenditures. This study aims to determine the effect of Regional Original Income, Revenue Sharing Funds and Total Population on Regional Expenditures. The population of this study is the Regency and City in West Sumatra Province. The sampling methode uses quantitative methods with analytical techniques in the form of panel data regression analysis. The results of this study indicate that the Regional Original Revenue has a significant positive effect on Regional Expenditure, while the Revenue Sharing Fund has a positive and significant effect, and the Number of Population has an insignificant negative effect. It is hoped that this research can be a reference in further research. It is hoped that this research can be a reference for the government to better utilize existing resources in order to prosper the community and better optimize the use of local revenue, regional expenditure funds, and profit-sharing funds.

Keywords: PAD, DBH, JP

Abstrak

Belanja daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan daerah, ketika pendapatan daerah semakin meningkat maka daerah tersebut akan semakin mampu dan mandiri untuk membiayai belanja daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan Teknik analisis berupa analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan, dan jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan pemerintah untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang ada agar bisa mensejahterakan masyarakat dan lebih bisa mengoptimalkan penggunaan pendapatan asli daerah, dana belanja daerah, dan dana bagi hasil.

Kata kunci: PAD, DBH, JP

PENDAHULUAN

Belanja daerah dalam PSAP No 2 adalah semua pengeluaran daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah (Lomboan et al., 2014). Belanja daerah menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sartika et al., 2019).

Belanja daerah penting karena belanja daerah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya serta memajukan daerah, ketika pendapatan daerah semakin banyak yang diperoleh maka semakin mampu dan mandiri untuk membiayai belanja daerahnya. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja yang semakin tinggi tentunya membutuhkan dana yang begitu besar agar kebutuhan otonomi daerah bisa terpenuhi. Belanja daerah dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat umum dengan memanfaatkan berbagai pemasukan meliputi: pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Kemudian belanja daerah juga dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk (Fasholla, 2018).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan lain-lain yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Sari & Nurul, 2018). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah supaya dapat membiayai pengeluaran daerah dan agar tidak menghambat kegiatan ekonomi yang bersangkutan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yefirson et al. (2015) ; Marizka (2013) ; Rahma & Catur (2017) terdiri dari variabel dependen dan variabel independen: Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Dana bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Yefirson et al., 2015). Dana Bagi Hasil yaitu pendapatan daerah yang sangat potensial karena salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Wulandari, 2014). Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) ; Masdjojo & Sukartono (2008); Nurdini et al. (2015) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Selanjutnya, selain dari penjelasan di atas Jumlah Penduduk juga sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) di suatu Provinsi. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan dalam deskripsi dan Analisis APBD, rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti Belanja Modal (Sari & Nurul, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Mia (2019) ; Devita et al. (2014); Ayu (2019) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Cherilina & Yuliasuti, 2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yang mana terdiri dari urusan wajib,

urusan pilihan, serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersana antara pemerintah daerah (Asdar & Naidah, 2020).

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan pemerintah daerah. Sebaiknya belanja pemerintah daerah lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah tersebut, agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Apabila pengeluaran yang tidak produktif maka dapat menghambat pembangunan ekonomi serta menghambat pertumbuhannya (Rahma & Catur, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli perekonomian yang dihasilkan dari suatu daerah, setiap daerah akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Apabila daerah tersebut memiliki kemajuan dalam bidang industri, serta memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki pendapatan asli daerah yang lebih besar dari daerah lainnya. Agar pendapatan daerah dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal, maka pendapatan asli daerah harus dikelola dengan benar (Sasti & Husnaina, 2012). Penerimaan dari suatu daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, dana pembangunan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dari pembelanjaan daerah, apabila Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi, dan tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat (Devita et al., 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan Yefirson et al. (2015); Marizka (2013); Rahma & Catur (2017); Masdjojo & Sukartono (2008); Devita et al. (2014); Nurdini et al. (2015); Pratama et al. (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dimana semakin besar pendapatan atau penerimaan pada daerah tersebut maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami peningkatan. Begitupun dengan meningkatnya Belanja Daerah bergantung pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Maka dapat diperoleh hipotesis, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu guna untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Untuk setiap Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Dana Bagi Hasil dengan jumlah yang cukup besar, hendaknya memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka demi mensejahterakan serta meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan infrastruktur dasar di daerah tersebut (Wulandari, 2014).

Penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (pasal 23 UU 33/2004) Bagi Hasil dibagi menjadi dua, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Penerimaan Dana Bagi Hasil dari pajak bersumber dari: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25. Dana Bagi Hasil Pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi: kehutanan mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusaha bumi dan perikanan. Hasil penelitian dari Wulandari (2014); Masdjojo & Sukartono (2008); Nurdini et al. (2015) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Maka dapat diperoleh hipotesis ini yaitu Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Jumlah Penduduk

Belanja daerah juga dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, sebagai asset yang mana apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian, ataupun keterampilan yang di miliki. Sehingga dapat meningkat produk nasional yang dihasilkan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadikan beban apabila struktur belanja daerah tersebut rendah. Serta persebaran dan mutunya juga akan rendah, sehingga banyak menuntut pelayanan sosial (Rahmadi et al., 2018). Besarnya pendapatan

di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, apabila jumlah penduduk di daerah tersebut meningkat maka pendapatan yang akan ditarik juga akan meningkat. Penduduk merupakan sumber daya utama serta berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu daerah (Asdar & Naidah, 2020).

Jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah/daerah dan tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku, titik bertambahnya jumlah penduduk menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah baik kuantitas ataupun kualitasnya. Hal ini akan berdampak pada anggaran belanja pemerintah daerah yang semakin besar. Jadi, meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan anggaran belanja daerah tersebut menjadi besar pula (Asdar & Naidah, 2020). Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Mia (2019) ; Devita et al. (2014) ; Ayu (2019) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Maka diperoleh hipotesis Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, sumber data tersebut adalah data sekunder dimana diperoleh secara tidak langsung di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau melalui media perantara di situs web. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dimana mengumpulkan seluruh bahan dan data-data yang diperlukan peneliti dalam bentuk laporan realisasi anggaran, dan data jumlah penduduk pada tahun 2015-2019 di provinsi Sumatera Barat.

Populasi merupakan kumpulan dari elemen yang sejenis serta dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya nilai karakteristik yang berlainan. Sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut (Wulandari, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun jumlah wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 19 kabupaten dan kota. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik simple random sampling. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu diambil beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sejumlah 10 kabupaten dan kota, meliputi: Kabupaten Bukit Tinggi, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Pariaman, Kabupatrn Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kota Padang, Kabupaten Payakumbuh, Kabupaten Sawahlunto.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan analisis regresi untuk mengamati hubungan antara variabel terikat (dependent variabel) dengan variabel bebas (independent variabel) (Pangestika, 2015). Untuk tingkat signifikansi adalah $\alpha=0,05$. Apabila dalam hasil analisis data menunjukkan probabilitas $>$ dari 0,05 maka dikatakan tidak ada pengaruh signifikan dengan variabel yang dianalisis, begitupun sebaliknya. Pengujian analisis data yang dilakukan meliputi: Uji Statistic deskriptif, Uji Stasioner, Uji Regresi Data Panel, Uji kebaikan Model dan Validitas Pengaruh, serta Uji Asumsi Klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN [RESULTS AND DISCUSSION]

Statistic Deskriptif

Uji Statistik deskriptif merupakan uji awal untuk melakukan screening data guna memperoleh nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dari masing-masing variabel. Jumlah data yang digunakan sebanyak 50 sampel kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2015-2019. Diperoleh hasil uji statistic deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X3	X2
Mean	9.23E + 11	1.18E +11	1.67E +10	253867.8
Median	7.65E + 11	8.50E +11	1.26E +10	255727.0
Maximum	2.35E + 12	5.49E +11	6.62E +10	415613.0
Minimum	4.78E + 11	2.97E +10	7.28E +08	60186.00
Std. Dev	4.65E +11	1.25E +11	1.47E +10	118371.0
Skewness	1.810614	2.519947	2.428089	-0.284255
Kurtosis	5.501586	8.325738	8.140881	1.744964
Jarque – Bera Probability	40.35671 0.000000	112.0084 0.000000	104.1898 0.000000	3.954833 0.138426
Sum	4.61E +13	5.91E + 12	8.34E +11	12693392
Sum Sq. Dev	1.06E +25	7.62E + 23	1.05E +22	6.87E + 11
Observations	50	50	50	50

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, untuk variabel Pendapatan Asli Daerah rata-ratanya bernilai Rp 118,261,649,953.06 dimana Kabupaten Kota Padang pada tahun 2017 dengan nilai tertinggi Rp 548,653,179,266.03 menunjukkan bahwa ekonomi pada daerah ini sangat tinggi. Sedangkan Kabupaten Pariaman tepatnya pada tahun 2016 memiliki nilai terendah yakni sebesar Rp 29,680,784,157.91. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya ada ketergantungan, sehingga nilainya rendah. Dengan adanya nilai rendah, daerah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Selanjutnya, variabel Dana Bagi Hasil rata-ratanya bernilai Rp 16,672,437,921.34 dimana Kabupaten Kota Padang pada tahun 2017 dengan nilai tertinggi Rp 66,174,694,053.00 menunjukkan bahwa ekonomi pada daerah ini sangat tinggi. Sedangkan Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya pada tahun 2015 memiliki nilai terendah yakni sebesar Rp 727,568,161.00. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya ada ketergantungan, sehingga nilainya rendah. Dengan adanya nilai rendah, daerah ini diharapkan mampu membiayai pengeluaran daerah.

Kemudian variabel Jumlah Penduduk rata-ratanya bernilai Rp 253867.84 dimana jumlah penduduk Kabupaten Kota Padang pada tahun 2019 dengan nilai tertinggi Rp 415,613.00. Sedangkan Kabupaten Sawahlunto tepatnya pada tahun 2015 memiliki nilai terendah jumlah penduduk yakni sebesar Rp 60,186.00. Bertambahnya jumlah penduduk menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah baik kuantitas ataupun kualitasnya, sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk variabel Belanja Daerah rata-ratanya bernilai Rp 922,715,520,334.33 dimana Kabupaten Kota Padang pada tahun 2019 dengan nilai tertinggi Rp 2,351,099,268,939.71 dan nilai terendah sebesar Rp 477,505,092,664.00 di Kabupaten Solok pada tahun 2015. Belanja daerah juga dipengaruhi adanya jumlah penduduk, Ketika jumlah penduduk berkurang pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat dapat tercapai dengan baik. sehingga pengeluaran produktif maka pembangunan ekonomi tidak akan menghambat belanja daerah.

Uji Stasioneritas

Metode yang digunakan dalam uji stasioneritas adalah uji root Levin, Lin & Chu. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas $< 0,05$ maka data penelitian tersebut bersifat stasioner.

Tabel 2. Uji unit root

No	Variabel	Prob.*	Keterangan
1	Belanja Daerah (Y)	0,0008	Data Stasioner
2	Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,0000	Data Stasioner
3	Dana Bagi hasil (X2)	0,0000	Data Stasioner
4	Jumlah Penduduk (X3)	0,0351	Data Stasioner

Sumber : Data diolah (2021)

Tabel 2 menunjukkan hasil uji unit root/ uji stasioneritas untuk variabel Belanja Daerah dengan nilai probability $0,0008 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Daerah memiliki data stasioner. Variabel Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan memiliki nilai probability $0,0000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki data stasioner. Kemudian pada variabel Dana Bagi Hasil ditunjukkan pada tabel kedua memiliki nilai probability $0,0000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki data stasioner. Merujuk pada Jumlah Penduduk memiliki nilai probability $0,0351 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk memiliki data stasioner. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa semua tabel memiliki data stasioner.

Uji regresi data panel

Tabel 3. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	22.185536	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	92.787405	9	0.0000

Sumber : Data diolah (2021)

Penentuan keputusan uji chow diambil berdasarkan nilai cross-section chisquare $> \alpha = 0,05$ maka CEM yang terpilih. Sebaliknya, jika nilai cross-section chisquare $< \alpha = 0,05$ maka FEM yang terpilih. Berdasarkan (tabel 3) dapat diketahui bahwa nilai cross-section chisquare $< \alpha = 0,05$. Artinya Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih dalam pengujian. Diketahui nilai cross-section chisquare pada probabilitas table di atas adalah $0,000 < 0,05$. Maka model fixed effect Model (FEM) yang terpilih dalam pengujian.

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	30.803186	3	0.0000

Sumber : Data diolah (2021)

Pengambilan keputusan dalam Uji hausman nilai dari *Cross-section random* probabilitas diperoleh nilai $0,000 < 0,05$, maka regresi yang terpilih ialah model *fixed effect*. maka kesimpulannya model yang dipakai yaitu metode *fixed effect* (FEM) dikarenakan *Cross-section* diperoleh nilai $< 0,05$. Maka model yang paling tepat untuk melakukan uji regresi linier yaitu menggunakan metode *fixed effect* (FEM). Jadi bisa disimpulkan, dalam uji regresi data panel, menggunakan uji chow dan uji hausman sama-sama diketahui nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka model yang terpilih dalam pengujian ini yaitu model *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Keباikan Model Dan Validitas Pengaruh

Tabel 5. Uji kebaikan Model Dan Validitas Pengaruh

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.52E+11	2.26E+11	3.759775	0.0006
JP	-2.348292	2.268841	-1.035018	0.3074
DBH	5320.511	886744.1	0.006000	0.9952
PAD	0.921166	0.366942	2.510387	0.0166
Effects Specification				
Cross-section Fixed (dummy variabel)				
Root MSE	6.12E+10	R-squared	0.982325	
Mean dependent var	9.23E+11	Adjusted R-squared	0.976593	
S.D. dependent var	4.65E+11	S.E. of regression	7.11E+10	
Akaike info criterion	53.03143	Sum squared resid	1.87E+23	
Schwarz criterion	53.52855	Log likelihood	-1312.786	
Hanna-Quinn criter.	53.22073	F-statistic	171.3676	
Durbin-Watson stat	2.219299	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber : Data diolah (2021)

Uji R square (koefisien determinasi atau R^2)

Uji R square dapat dipergunakan untuk menganalisa seberapa berpengaruh variabel independen pada variabel dependen. Dari tabel diatas menunjukkan nilai R^2 positif, ketika nilai R^2 adalah 0,982325 atau 98,23% mendekati 1 maka menunjukkan bahwa model regresi terpilih tepat untuk memprediksi nilai variabel dependen secara sempurna.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji variable bebas secara simultan dengan variable terikat. Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai *prob. F (Statistic)* adalah $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 di terima, dengan ini seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara serentak.

Uji Statistik T

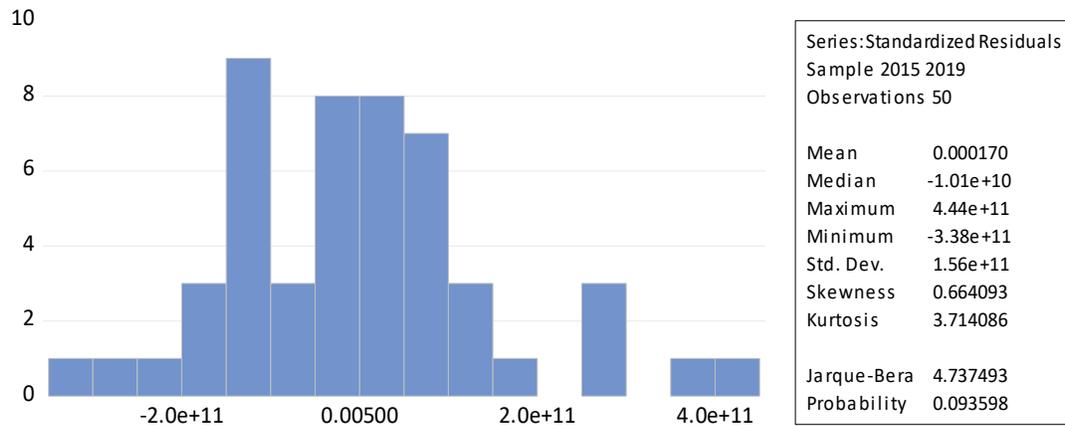
Uji statistik T bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara individu dalam menjabarkan variasi variabel dependen. Jika ingin membandingkan nilai probabilitas dari setiap variabel dengan Alpha 0,05 maka dapat dilihat dari tabel 5. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai probabilitas $0,0166 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian untuk variabel Dana Bagi Hasil memperoleh nilai probabilitas $0,9952 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Lalu pada variabel Jumlah Penduduk terdapat nilai probabilitas sebesar $0,3074 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan jika Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai data kelompok atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Yusuf & Reza, 2019). Dari grafik diatas terlihat bahwa data menyebar disekeliling garis diagonal lalu menyusuri ke arah garis diagonal atau grafik histogram, hal tersebut memperlihatkan distribusi normal. Demikian model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan dalam tabel nilai Probabilitas $0,0935 > 0,05$, maka data diatas sudah berdistribusi normal.

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah (2021)

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai data kelompok atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Yusuf & Reza, 2019). Dari grafik di atas terlihat bahwa data menyebar disekeliling garis diagonal lalu menyusuri ke arah garis diagonal atau grafik histogram, hal tersebut memperlihatkan distribusi normal. Demikian model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan dalam tabel nilai Probabilitas $0,0935 > 0,05$, maka data di atas sudah berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Tabel 6. Uji multikolineritas

	PAD	DBH	JP
PAD	1.000000	-0.265494	0.912770
DBH	-0.265494	1.000000	-0.164275
JP	0.912770	-0.164275	1.000000

Sumber: Data Diolah (2021)

Dilihat dari tabel 7, nilai kolerasi dari Pendapatan Asli daerah (X1) dengan Dana bagi hasil (X2) sebesar $-0,265494$. Selanjutnya nilai kolerasi Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Jumlah Penduduk (X3) sebesar $0,912770$. Sedangkan nilai kolerasi dana bagi hasil (X2) dengan Jumlah Penduduk (X3) sebesar $-0,164275$. Berdasarkan masing-masing nilai korelasi antar variabel independent menunjukkan angka lebih kecil dari $0,8$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi gejala multikoliner atau dinyatakan lulus uji multikolineritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.97E+10	3.65E+10	-0.540574	0.5914
PAD	-0.116663	0.262916	-0.443728	0.6593
DBH	395691.3	114720.1	3.449189	0.0012
JP	3.006321	2.187193	1.374511	0.1759
Root MSE	8.62E+10	R-squared	0.274088	
Mean dependent var	1.17E+11	Adjusted R-squared	0.226746	
S.D. dependent var	1.02E+11	S.E. of regression	8.98E+10	
Akaike info criterion	53.35680	Sum squared resid	3.71E+23	
Schwarz criterion	53.50976	Log likelihood	-1329.920	
Hanna-Quinn criter.	53.41505	F-statistic	5.789512	
Durbin-Watson stat	1.267098	Prob(F-statistic)	0.001914	

Sumber: Data Diolah (2021)

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengetahui gejala heterokedastisitas, salah satunya yaitu dengan menggunakan uji glester. Uji glester yaitu metode uji heterokedastisitas yang digunakan untuk menguji apakah varians dari eror bersifat heterokedastisitas atau tidak. Dari data di atas nilai probabilitasnya adalah $0,001914 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heterokedastisitas yang mengidentifikasi bahwa regresi tidak lolos uji heterokedastisitas dan homogenitas tidak terpenuhi.

Uji Autokolerasi

Tabel 8. Uji Autokolerasi

F-statistic	3.447471	Prob.F(2,44)	0.0407
Obs*R-squared	6.773700	Prob.Chi-Square(2)	0.0338

Sumber: Data Diolah (2021)

Autokorelasi merupakan elemen eror berkorelasi dengan diri sendiri berdasarkan ukuran waktu (untuk data time series) ataupun urutan ruang (untuk data cross section). Penyebab terjadi autokorelasi yaitu Ketika suatu variable pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Dari nilai Prob Chi Square(2) merupakan nilai p value uji breush-godfrey serial correlation LM, yaitu sebesar $0,0338$ dimana $< 0,05$ sehingga model regresi terjadi autokorelasi.

Diskusi: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka belanja daerah juga akan meningkat begitupun sebaliknya, apabila pendapatan asli daerah mengalami penurunan maka belanja daerah juga akan mengalami penurunan. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan lain-lain yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh maka pemerintah daerah memiliki kecukupan dana untuk melakukan pembangunan dan program-program kesejahteraan. Penelitian ini selaras dengan yang penelitian yang dilakukan oleh Yefirson et al. (2015); Marizka (2013); Masdjojo & Sukartono (2008); Devita et al. (2014); Nurdini et al. (2015) menunjukkan bahwa dalam penelitianya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2019. Dengan meningkatnya dana bagi hasil tidak dibarengi dengan peningkatan belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil berasal dari pendapatan pajak maupun non pajak oleh daerah dan pusat. Tidak adanya signifikansi dana bagi hasil terhadap belanja daerah disebabkan oleh belum terciptanya keoptimalan dana transfer baik pajak maupun nonpajak untuk mendanai kebutuhan daerah yang telah dianggarkan dalam RAPBD. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdini et al. (2015) dan Masdjojo & Sukartono (2008) hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan, namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melda & Efrizal (2020) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah

Jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah di pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2019. Artinya apabila nilai jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka nilai belanja daerah akan mengalami penurunan. Begitu sebaliknya, apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, maka nilai belanja daerah akan mengalami peningkatan. Besarnya jumlah penduduk pada suatu daerah dapat menjadi beban bagi daerah tersebut. Pemerintah daerah masih bergantung terhadap transfer dana dari pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, yaitu untuk meningkatkan nilai belanja langsungnya, maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk dapat mengurangi belanja langsung.

Selanjutnya, selain dari penjelasan di atas Jumlah Penduduk juga sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) di suatu Provinsi. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan dalam deskripsi dan Analisis APBD, rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti Belanja Modal (Sari & Nurul, 2018). Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Mia, (2019) menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia dalam hipotesis berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD provinsi Sumatera Barat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial mengalami pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sementara pada dana bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Jumlah Penduduk menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar, & Naidah. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ekonomi*, 16.
- Ayu, N. K. (2019). *Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah RINGKASAN SKRIPSI*.
- Cherilina, P., & Yuliasuti, R. (2004). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Devita, A., Arman, D., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2, 63–70.
- Fasholla, R. tri. (2018). *Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Cilacap*.
- Lomboan, S. M., Ventje, I., & Inggriani, E. (2014). Analisis Belanja Langsung Pada Dinas

- Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 2(3), 952–961.
<https://doi.org/10.35794/emba.v2i3.5735>
- Marizka, R. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)*.
- Masdjojo, N. G., & Sukartono. (2008). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. 6.
- Melda, H., & Efrizal, S. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838.
- Nurdini, R., Adi, W., & Yusriati, N. F. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jaka)*, 2(1), 80–94.
- Pangestika, S. (2015). *Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (cem), Fixed Effect Model (fem), dan Random Effect Model (rem)*.
- Pratama, Y. S., Idah, Z., & Abdullah, M. F. (2019). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1–10.
- Rahma, M. W., & Catur, M. F. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. 1(1), 63–76.
- Rahmadi, Y., Erni, F. H., & Nurul, H. (2018). *Analisis Data Panel : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat*. 3–4.
- Ramadhani, R., & Mia, A. S. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/ jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726.
- Sari, P., & Nurul, H. N. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD , DAU , Dan DAK Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12.
- Sartika, D., Atika, U., & Andre, I. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
- Sasti, I. F., & Husnaina, P. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat)*. IV(3).
- Wulandari, Y. (2014). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*.
- Yefirson, Raja, M., & Muhammad, N. (2015). Analisis kemampuan keuangan daerah kabupaten induk dan kabupaten pemekarannya di propinsi sumatera barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 47–56.
- Yusuf, M., & Reza, nurul I. (2019). Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri Dan Ekspor Terhadap Stabilitas Nilai Tukar. *Penelitian Pendidikan Sosial Humoniora*, 4(2).

